

DAFTAR ISI

Halaman Judul-----	i
Halaman Pengesahan-----	ii
Halaman Pernyataan -----	iii
Prakata-----	iv
Daftar Isi-----	vii
Daftar Gambar-----	viii
Daftar Tabel-----	ix
Intisari-----	x
BAB I: PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Rumusan Masalah-----	9
C. Keaslian Penelitian-----	9
D. Manfaat Penelitian-----	13
E. Tujuan Penelitian-----	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA-----	15
A. Pokok-pokok <i>Landreform</i> -----	15
B. Kewajiban Mengerjakan Sendiri secara Aktif-----	28
C. Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian secara Absentee-----	32
D. Pelaksanaan dan Pengawasan tentang Aturan Larangan Kepemilikan Tanah secara <i>Absentee</i> -----	38
BAB III METODE PENELITIAN-----	44
A. Jenis dan Sifat Penelitian-----	44
B. Cara Pengumpulan Data-----	44
C. Lokasi Penelitian-----	47
D. Alat yang Dipakai-----	48
E. Tahapan dalam Penelitian-----	48
F. Analisis Hasil-----	49
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN-----	50
A. Terjadinya Kepemilikan Tanah Pertanian secara <i>Absentee</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta-----	50
B. Pelaksanaan Aturan tentang Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian secara <i>Absentee</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta-----	73
C. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Aturan tentang Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian secara Absentee di Daerah Istimewa Yogyakarta-----	114
BAB V PENUTUP-----	130
A. Kesimpulan-----	130
B. Saran-----	131
DAFTAR PUSTAKA-----	134
LAMPIRAN-----	138

DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan	Hal.
4.1.	Surat Pertimbangan Teknis-----	122
4.2.	Keterangan Rencana Kabupaten-----	123

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Hal.
3.1.	Nama Responden-----	45
4.1.	Pemilik Tanah Pertanian karena Berpindah Domisili-----	52
4.2.	Pemilik Tanah Pertanian karena Warisan-----	64
4.3.	Pemilik Tanah Pertanian yang Tidak Dikerjakan Sendiri-----	70
4.4.	Landasan Hukum Pengaturan Kecamatan yang Berbatasan-----	
	Langsung-----	80
4.5.	Pemilik Tanah Pertanian karena Berbatasan Langsung-----	80
4.6.	Landasan Hukum Pengecualian karena Pegawai Negeri Sipil-----	92
4.7.	Pemilik Tanah Pertanian karena Pegawai Negeri Sipil-----	92
4.8.	Landasan Hukum Pemecahan Tanah Pertanian-----	99
4.9.	Landasan Hukum Kepemilikan Tanah yang Telah Lampau-----	103
4.10.	Pengaturan Mengenai Ketentuan Menjual Habis-----	108
4.11.	Pengaturan Mengenai Pengawasan terhadap Pemilik Tanah Pertanian-----	112
4.12.	Pemilik Tanah Pertanian karena Alih Fungsi lahan-----	124